

## KEPENTINGAN INDONESIA TERHADAP TIMOR LESTE DALAM KERJA SAMA SELATAN-SELATAN (2016-2018)

Chensy Silvia Gusti

Email: [chensy.silvia4214@student.unri.ac.id](mailto:chensy.silvia4214@student.unri.ac.id)

Dibawah Pembimbing: Dr. H. Mhd. Saeri, M.Hum

Email: [m.saeri@lecturer.unri.ac.id](mailto:m.saeri@lecturer.unri.ac.id)

Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru  
Pekanbaru 28294  
Telp/Fax. 0761-63277

### ABSTRACT

*Indonesia made Timor Leste a priority country in South-South Cooperation in terms of the number of programs provided by Indonesia to Timor Leste. This policy demonstrates Indonesia's interest in Timor Leste in South-South Cooperation. The purpose of this study is to determine Indonesia's interests in Timor Leste in the framework of South-South Cooperation 2016-2018. The pluralism perspective used in this study views that strong relationships between countries are influenced by dependency factors. This study uses the theory of foreign policy in which policy making is influenced by national interests. This research uses a qualitative-descriptive method through literature study.*

*South-south cooperation is a collective action between developing countries in the form of economic, socio-cultural, and technical cooperation such as the exchange of knowledge and technology. The perspective of actors and national interests are internal factors in international cooperation. Based on data analysis, Indonesia has achieved political, economic and defense and security interests in making Timor Leste a priority country to receive South-South Cooperation. The protection of Indonesian citizens and national integrity, accelerating compliance with border regulations, expanding Indonesia's influence in international forums, and maintaining Indonesia's influence as the main importing country in Timor Leste are in Indonesia's interests towards Timor Leste in South-South Cooperation. Several excellent programs that have been given by Indonesia to Timor Leste in the 2016-2018 period include the exchange of knowledge in improving entrepreneurial education, building national roads and building the capacity of police personnel.*

**Keywords:** *South-south Cooperation, Foreign Policy, National Interest.*

## Pendahuluan

Sebagai negara yang menjadi inisiator Gerakan Non-Blok (GNB) dan Konferensi Asia Afrika (KAA) telah membuat Indonesia menjadi negara yang aktif dalam forum Internasional khususnya diantara negara-negara berkembang lainnya. Kerja sama Selatan-selatan (KSS) adalah sebuah Kerja sama internasional yang dilaksanakan Indonesia dalam memberdayakan peran Indonesia tersebut.

Kerja sama selatan-selatan secara istilah merupakan Kerja sama antara negara berkembang dan negara berkembang lainnya, disebut dengan Kerja sama selatan-selatan karena sebutan negara berkembang dalam pandangan global adalah negara selatan. Secara istilah, Kerja sama Selatan Selatan atau disingkat KSS merupakan hubungan Kerja sama yang dilaksanakan oleh dua atau lebih negara-negara yang sedang berkembang untuk meningkatkan perkembangan pembangunan dan mengejar tujuan bersama. Secara lebih rinci dijelaskan oleh Kakonge dalam bukunya *The Evolution of South-South Cooperation* Kerja sama Selatan-Selatan adalah sebuah proses Kerja sama antara dua atau lebih negara yang berkembang dalam mencapai tujuan pembangunan baik individu ataupun kolektif melalui Kerja sama berupa pertukaran ilmu pengetahuan, sumberdaya, keterampilan, serta keahlian teknis.<sup>1</sup> Kerja sama Selatan-selatan dilakukan secara mutual melalui berbagai hubungan bilateral maupun multilateral. Kerja sama ini dilakukan antar negara berkembang dengan tujuan

<sup>1</sup> Kokonge, J. O., *The Evolution of South-South Cooperation: A Personal Reflection*, Global Policy Essay, July, 2014, hlm. 1.

meminimalisir ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju.<sup>2</sup>

Negara-negara yang menjadi target Kerja sama selatan-selatan dari Indonesia adalah negara-negara Asia, Afrika, dan Asia Pasifik serta Amerika Latin. Berikut data presentase negara yang menjadi peserta program Kerja sama selatan-selatan yang diselenggarakan oleh Indonesia. Menurut daftar kawasan, kawasan Asia merupakan salah satu kawasan yang mendapatkan perhatian banyak dalam menjalankan program ini.<sup>3</sup>

Gambar 1. Daftar Negara Prioritas Kerja sama Selatan-Selatan Indonesia

Priority Countries untuk KSS Indonesia		
Skala A <i>(Didasarkan pada pertimbangan kepentingan nasional Indonesia, nilai politik dan ekonomis)</i>	Skala B <i>(Didasarkan pada komitmen dan permintaan Kepala Negara dan/atau Pejabat setingkat Menteri RI maupun dari negara akreditasi)</i>	Skala C <i>(Didasarkan pada peninjauan dan informasi awal, serta pertimbangan lainnya yang relevan)</i>
Palestina	Vietnam	Samoa, Tonga, Peru
Afghanistan	Srilanka	Marshall Islands, Palau
Arab Spring Countries	Tanzania	Uzbekistan, Kyrgyzstan
Timor Leste	Gambia	Bangladesh, Nepal, Bhutan
Myanmar	Namibia	Somalia, Suriname, Guyana
Vanuatu, PNG, Fiji	Pakistan	Irak, Maladewa, Madagaskar
Kamboja	Ekuador	Chile, El Salvador, Kosta Rika
Laos	American Samoa	Senegal, Angola
Sudan		Guatemala, Honduras, Kuba, Panama, Nikaragua, Belize
Kenya		Ethiopia, Mozambique
Nigeria		Zimbabwe

Sumber: Laporan Tahunan Kerja sama selatan-selatan Indonesia, 2016

Secara khusus, di kawasan Asia, di bidang politik dan ekonomi Negara Republik Demokratik, Timor Leste merupakan Negara yang diprioritaskan Indonesia untuk diberikan program Kerja sama Selatan selatan. Selain dari itu, Timor Leste pada tahu 2016 merupakan negara yang

<sup>2</sup> Nadjundan, S. 1986. "From North-South to South-South". *Economic and Political Weekly*, Vol. 21, No. 38/39 (Sep. 20-27, 1986).

<sup>3</sup> Bulbul Abdurachman & Bagus Mi'raz Prakoso, Peran Indoensia dalam Kerja sama Selatan-selatan dan Triangular, *Jurnal Transborders*: Vol.1 No.1 (Desember 2017)

mendapatkan banyak program dari pada negara kawasan Asia lainnya.

Indonesia dalam kerjasam selatan-selatan berani mengucurkan dana untuk program-program Kerja sama selatan-selatan Indonesia. Negara kecil, dan sedang berkembang seperti Timor Leste mendapatkan perhatian lebih dari Indonesia. Dari keadaan tersebut peneliti menyimpulkan adanya kepentingan Indonesia terhadap Timor Leste, meskipun negara Timor Leste bukanlah negara yang menguntungkan untuk diajak bekerja sama, terlebih secara ekonomi dan pembangunan. Kepentingan apa yang ingin dicapai oleh Indonesia dari hubungan antara Indonesia dan Timor Leste melalui Kerja sama selatan-selatan merupakan rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini.

## **Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori**

### **Perspektif Pluralisme**

Perspektif yang dipakai dalam penelitian ini adalah perspektif Pluralisme. Bagi kaum pluralis, Negara bukan aktor rasional. Dalam kenyataannya pembuatan kebijakan luar negeri suatu negara merupakan proses yang diwarnai konflik, kompetisi dan kompromi antar aktor di dalam negara.

### **Konsep Kepentingan Nasional**

Donald E. Nuechterlein dalam tulisannya menjelaskan bahwa pengertian kepentingan nasional dalam bentuknya yang paling sederhana adalah kebutuhan dan keinginan yang dirasakan dari satu negara berdaulat dalam hubungannya dengan negara berdaulat lainnya yang terdiri dari lingkungan eksternal. Kepentingan dasar nasional ini dapat digambarkan sebagai berikut:

(1) Kepentingan pertahanan: perlindungan negara-bangsa dan

warganya dari ancaman kekerasan fisik yang diarahkan dari negara lain, dan / atau ancaman yang diilhami dari luar terhadap sistem pemerintahannya. (2) Kepentingan ekonomi: peningkatan kesejahteraan ekonomi negara-bangsa dalam hubungannya dengan negara lain. (3) Kepentingan Tatanan Dunia: pemeliharaan sistem politik dan ekonomi internasional di mana negara-bangsa mungkin merasa aman, dan di mana warga negara dan perdagangannya dapat beroperasi secara damai di luar perbatasannya. (4) Kepentingan ideologis: perlindungan dan kelanjutan seperangkat nilai yang dimiliki bersama oleh masyarakat suatu negara-bangsa dan diyakini sebagai kebaikan universal.<sup>4</sup>

### **Teori Kebijakan Luar Negeri**

Untuk menjelaskan fenomena kerja sama Indonesia ke Timor Leste dalam kerja sama selatan-selatan dalam menjalankan kepentingan Indonesia terhadap Timor Leste peneliti menggunakan teori yang dikemukakan oleh John P. Lovell tentang strategi kebijakan luar negeri (*Foreign Policy Strategy*). Di dalam teori ini, John P. Lovell menjelaskan bahwa *foreign policy strategy* adalah hubungan antar negara dideterminasikan oleh dua variabel, yaitu posisi negara lain terhadap negara sendiri (mendukung atau mengancam) dan penilaian kapabilitas/kemampuan negara sendiri dalam beberapa aspek kekuatan.<sup>5</sup>

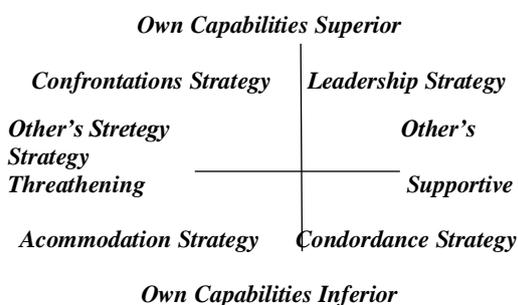
Jadi setiap kebijakan yang akan diambil oleh suatu negara terhadap

---

<sup>4</sup> Donald E. Nuechterlein, National Interests and Foreign Policy: A conceptual framework for Analysis and decision making. *British Journal of International Studies* Vol. 2, No. 3 (Oct., 1976), pp. 246-266

<sup>5</sup> John P. Lovel. 1970. *Foreign Policy in Perspective: Strategy, Adaptation, Decision Making*. New York hal 99

negara tertentu yang menjadi acuan sebelum memutuskan suatu strategi kebijakan adalah kedua variabel tersebut. Strategi tersebut dilukiskan dalam model sebagai berikut;



Sehingga salah satu dari 4 strategi yang di tawarkan oleh Jhon P Lovell tersebut, dimana penulis menggunakan teori *Leadership Strategy* dijalankan oleh Indonesia dalam membuat kebijakan luar negerinya. Dimana Indonesia merupakan salah satu negara besar yang memprioritaskan Timor Leste sebagai negara kecil dalam suatu kerja sama.

### Tingkat Analisa

Dalam penelitian ini penulis mengambil tingkat analisa kelompok Negara Bangsa yang menganggap bahwa hubungan internasional adalah interaksi yang dibentuk oleh kelompok negara. Kerja sama Selatan-Selatan merupakan hasil dari interaksi dari kelompok negara-negara berkembang di dunia internasional. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan penelitian pada dua variabel yaitu menganalisa hubungan antara negara Indonesia dengan Timor Leste melalui Kerja sama selatan-selatan.

### Metode Penelitian

Berdasarkan data yang dikumpulkan, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, melalui studi pustaka dan

data bahan sekunder. Metode penelitian ini juga dielaborasi dengan cara deskriptif terkait masalah dan gambaran yang sesuai dengan permasalahan di lapangan.<sup>6</sup> Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal studi pustaka, penelitian ini akan menggunakan: (a) sumber-sumber primer berupa publikasi resmi pemerintah dan data-data primer dari lembaga-lembaga penelitian serta pusat informasi, baik dari kalangan pemerintah maupun non-pemerintah; (b) sumber-sumber sekunder berupa analisis para ahli maupun praktisi di buku-buku, jurnal-jurnal, *working paper*, tulisan-tulisan di media massa dan sebagainya.

### Hasil dan Pembahasan Indonesia dalam kerja sama selatan-selatan

Komitmen Indonesia dalam Kerja sama Selatan-selatan ditunjukkan Indonesia dari jumlah program dan dana yang dikucurkan Indonesia dalam program Kerja sama selatan-selatan. Capaian global Kerja sama selatan-selatan Indonesia pada tahun 2000-2015 dengan 57,4 juta US\$ dana anggaran dengan tercapainya 783 program Kerja sama Selatan-selatan yang dilakukan Indonesia terhadap negara-neagra berkembang lainnya.<sup>7</sup> Dalam rencana Strategis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Tahun 2015-2019 disebutkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia menempatkan prioritas terhadap isu yang terkait kepentingan masyarakat, seperti isu perdamaian, peningkatan perlindungan WNI di luar negeri,

<sup>6</sup> Bagong Suyanto dan Satinah, *Metode Penelitian Sosial sebagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006)

<sup>7</sup> Laporan Tahunan Kerja sama Selatan-selatan tahun 2015.

lingkungan hidup, demokrasi dan HAM, serta Kerja sama selatan-selatan.<sup>8</sup>

Indonesia menaruh komitmen terhadap pelaksanaan Kerja sama Selatan-selatan dengan mencantumkan Kerja sama Selatan-selatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2015. Pada tahun 2016 total anggaran pemerintah Indonesia untuk program Kerja sama selatan-selatan mencapai 15,08 juta US\$.<sup>9</sup> Tahun 2016 bisa dibilang tahun teraktif Indonesia dalam memberikan program Kerja sama Selatan-selatan ini. Melihat perbandingan total dana yang dikururkan antara tahun 2016 dengan tahun 2000-2015.

Kesepakatan-kesepakatan tentang Kerja sama selatan-selatan seperti KAA, GNB, ACCRA, *Nairobi Document*, *South Summit I* dan *II*, dan *Bogota Statement*, mendorong Indonesia untuk menindak lanjuti komitmen Indonesia dalam Kerja sama Selatan-selatan. Kesepakatan-kesepakatan yang telah dilaksanakan tersebut pada dasarnya merupakan upaya dalam meneguhkan komitmen bagi negara berkembang dalam melaksanakan Kerja sama Selatan-Selatan. Sebagai langkah dan tindak lanjut dari kesepakatan-kesepakatan tersebut, Pemerintah Indonesia menandatangani "*Jakarta Commitment*" dengan 22 negara dan lembaga donor pada tahun 2010. Kesepakatan ini bertujuan untuk meraih suatu posisi yang setara di antara negara donor dan resipien dengan tujuan mengefektifkan pinjaman luar negeri agar tepat sasaran pada pembangunan. Poin paling krusial dalam *Jakarta Commitment: Aid for Development Effectiveness Indonesia's Road Map to 2014* adalah perbaikan

mekanisme bantuan internasional dan penguatan Kerja sama Selatan-Selatan. Pemerintah Indonesia dan negara-negara mitra dituntut untuk berkomitmen dalam rangka memperkuat kelembagaan untuk memberikan ruang yang luas bagi Kerja sama Selatan-Selatan.<sup>10</sup>

Politik luar negeri suatu negara dibuat sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Politik luar negeri merupakan sikap yang dipakai dalam pengambilan keputusan., sikap ini memperlihatkan status negara dan dampaknya terhadap hubungan luar negeri suatu negara dengan negara lainnya.

Politik Luar Negeri Indonesia "Bebas dan Aktif" telah menjadi acuan Indonesia dalam mengambil keputusan dalam forum-forum internasional dan kebijakan luar negeri Indonesia. Politik bebas dan aktif membuat Indonesia berperan aktif dalam pergaulan internasional. Indonesia menentukan kebijakan luar negeri khususnya dalam Kerja sama selatan-selatan dengan politik "*million friends, zero enemy*"<sup>11</sup> yang dicetuskan presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Falsafah tersebut yang mendorong Indonesia untuk berperan aktif dalam forum internasional. Indonesia terhitung aktif dalam Kerja sama selatan-selatan sejak pemerintahan SBY, Kerja sama ini mendapatkan tempat yang lebih baik dari pemerintahan sebelumnya, dalam pengambilan kebijakan luar negeri, SBY menyatakan bahwa politik luar negeri Indonesia harus senantiasa berkorelasi secara jelas dengan kepentingan nasional.

<sup>8</sup> Renstra Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 2015-2019.

<sup>9</sup> Laporan tahun Kerja sama Selatan-selatan tahun 2016.

<sup>10</sup> CEACoS FISIP UI, 2010, Studi Arah Kebijakan Indonesia dalam Selatan-selatan Laporan Akhir dan Policy Paper, Universitas Indonesia, Jakarta, hal.24

<sup>11</sup> *Op Cit*, Studi arah Kebijakan Kerja sama Selatan-selatan Indonesia.

## **Kepentingan Nasional Indonesia terhadap Timor Leste dalam kerja sama selatan-selatan**

Kerja sama selatan-selatan yang dilaksanakan Indonesia mengandung beberapa kepentingan nasional yang mendasari kebijakan ini. Kepentingan Indonesia dalam Kerja sama selatan selatan secara garis besar adalah untuk memperluas pengaruh Indonesia di tingkat regional maupun global, meningkatkan status Indonesia, dan meningkatkan pembangunan dalam negeri Indonesia. Sesuai dengan Visi pelaksanaan Kerja sama Selatan-selatan Indonesia, dengan Visi “Kemitraan yang lebih baik untuk kesejahteraan” (*Better Partnership for Prosperity*) Indonesia memiliki tujuan utama dalam Kerja sama Selatan-selatan yaitu untuk mempercepat pembangunan ekonomi Indonesia dan mendukung negara-negara selatan serta meningkatkan kemandirian Bersama (*collective self reliance*) atas dasar solidaritas *mutual opportunity* dan *benefit*.<sup>12</sup>

Berikut kepentingan Nasional Indonesia yang terbagi atas kepentingan politik, kepentingan ekonomi dan kepentingan pertahanan dan kemanan

### **Kepentingan Politik**

1. Memperkuat Hubungan Luar Negeri Indonesia - Timor Leste

Upaya Indonesia untuk memperbaiki hubungan luar negeri dengan timor Leste pasca kemerdekaannya sangat diperlukan, mengingat agar Timor leste tidak berkembang menjadi suatu ancaman bagi kemanan dana stabilitas nasional Indonesia. Selain itu Indonesia juga melakukannya demi memperbaiki citra dan posisi Indonesia dalam forum

<sup>12</sup> BPPK Kemlu RI, Kajian Mandiri: Reorientasi Kerja sama Selatan Selatan dan Triangular bagi Kepentingan Nasional, 2015

internasional. Hal-hal tersebutlah yang menjadikan Timor Leste sebagai negara prioritas dalam Kerja sama selatan-selatan.

2. Memperluas pengaruh Indonesia dalam forum internasional dan meningkatkan konektivitas Indonesia dengan negara-negara berkembang lainnya

Salah satu alasan penleiti mengambil Kerja sama selatan-selatan sebagai tema adalah kepentingan Indonesia untuk memperluas pengaruh. Kerja sama selatan-selatan dihipung oleh forum internasional seperti G77, sehingga setiap progress dan kemajuan yang dilaksanakan oleh Indonesia dalam Kerja sama ini tercatat dalam forum internasional tersebut. Kepada Timor leste salah satunya diharapkan dapat mengubah pandangan dunia terhadap Indonesia pada masa sebelum kemerdekaan Timor Leste. Indonesia berperan aktif dalam memberikan Kerja sama selatan selatan terhadap negara lainnya seperti Asia Pasifik pun telah membawa Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB mewakili Asia Pasifik pada tahun 2019-2020. Persaingan ketat Indonesia dengan Maladewa terjadi saat pemilihan, namun Indonesia meraihnya karena dukungan dari negara-negara Asia Pasifik sebagian didapatkan oleh Indonesia.<sup>13</sup>

### **Kepentingan Ekonomi**

1. Mempertahankan pengaruh Indonesia sebagai negara Impor utama Timor Leste

Sejak tahun 2010 Indonesia telah menjadi negara impor terbesar dalam

<sup>13</sup>Boeikie Adam Noor, Alasan Indonesia Terpilih Menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB Periode 2019-2020. Jurusan Hubungan Internasional, UIN SYARIF HIDAYATULLAH, Jakarta. 2019.

perekonomian Timor Leste. Indonesia menguasai 80% pasar dan kebutuhan pokok lainnya di negara Timor Leste. Dalam neraca perdagangan Indonesia selalu mendapatkan bagian surplus yang terus meningkat antara Indonesia dan Timor Leste sejak tahun 2007.<sup>14</sup> Bahkan pada tahun 2019 lalu Alberto XP Carlos Duta Besar Timor Leste untuk Indonesia meminta Indonesia untuk memenuhi kuota ekspor Timor Leste. Beliau mengatakan akan memberikan kesempatan lebih kepada investor Indonesia untuk mengambil kuota atau jatah ekspor Timor Leste sendiri, contohnya dibagian peternakan, dengan syarat Indonesia mengajarkan Timor Leste (memberikan Kerja sama selatan-selatan berupa pertukaran pengetahuan). Selain itu Alberto juga menyebutkan bahwa telah terdapat kurang lebih 500 pengusaha Indonesia dalam skala besar atau kecil di Timor Leste<sup>15</sup>

### **Kepentingan Kemanan**

1. Mempercepat kesepakatan peraturan perbatasan Indonesia – Timor Leste

Kepentingan Indonesia selanjutnya setelah memperbaiki hubungan luar negeri dengan Timor Leste adalah menyelesaikan perbatasan Indonesia dan Timor Leste. Penentuan batas wilayah ini berlangsung cukup lama. Indonesia sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dihadapkan dengan masalah perbatasan yang kompleks khususnya dengan

Timor Leste. Dalam RPJMN II Tahun 2010-2014 menempatkan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan sebagai prioritas nasional. Maka pengelolaan batas wilayah di kawasan perbatasan difokuskan pada penyelesaian kesepakatan batas wilayah negara baik darat atau laut.

Permasalahan batas Indonesia dan Timor Leste dikarenakan ketidakcocokan antara kesepakatan yang tertera di dalam dasar hukum dengan kenyataan di lapangan yang diketahui masyarakat saat ini. Disinilah Kerja sama selatan-selatan berperan penting untuk menyelesaikan pengelolaan perbatasan masing-masing negara. Kerja sama selatan-selatan merupakan salah satu Kerja sama yang membantu Indonesia untuk menjadi alat diplomasi dalam *total diplomacy* Indonesia terhadap Timor Leste dalam kesepakatan perbatasan<sup>16</sup>

Kesepakatan batas Indonesia dan Timor Leste tercapai pada tahun 2005 ditandai dengan berhasilnya Indonesia dan Timor Leste menandatangani kesepakatan wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste menurut peninggalan Belanda dan Portugis yaitu *Provisional Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste on the Land Boundary*. Namun kesepakatan ini baru menyelesaikan sebagian batas darat Indonesia.

Hingga tahun 2013, 3% batas darat belum disepakati antara Indonesia dan Timor Leste. Pada tahun 2013 telah disepakati aturan terhadap beberapa wilayah, namun belum juga mencapai batas kesepakatan bagi semua wilayah yang masih dipertegangkan oleh Indonesia dan Timor Leste.

<sup>14</sup> KBRI Dili, Profil negara Timor Leste. Diakses dari [https://kemlu.go.id/dili/id/pages/profil\\_negara\\_timor-leste\\_/1748/etc-menu](https://kemlu.go.id/dili/id/pages/profil_negara_timor-leste_/1748/etc-menu)

<sup>15</sup> Timor Leste ajak Indonesia penuhi kuota ekspor. Diakses dari <https://www.antarane.ws.com/berita/1061256/timor-leste-ajak-indonesia-kerja-sama-penuhi-kuota-ekspor>

<sup>16</sup> Rencana pengelolaan batas wilayah negara Kawasan perbatasan 2011-2014, diakses dari [www.dsfindonesia.org](http://www.dsfindonesia.org)

Akhirnya pada tahun 2019 kesepakatan batas darat Indonesia dan Timor Leste tercapai secara keseluruhan dalam pertemuan antara Menteri bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) dan Menteri Luar Negeri Indonesia dengan Menteri Perencanaan dan Investasi Strategis Timor Leste di Jakarta, 22 Juli 2019. Kesepakatan ini akan dimasukkan kedalam addendum kedua dari kesepakatan perbatasan tahun 2005. Maka dari itu setelah rampungnya perbatasan darat Indonesia-Timor Leste, kedua negara sepakat untuk mulai melaksanakan perundingan batas maritim.<sup>17</sup>

Tentu saja kesepakatan ini dibantu oleh diplomasi total yang dilakukan Indonesia terhadap kesepakatan perbatasan ini, salah satunya dengan menjadikan Timor Leste sebagai negara prioritas dalam pemberian program Kerja sama Selatan-selatan sejak tahun 2015/2016.

## 2. Menjaga keutuhan NKRI

Negara-negara sasaran prioritas Indonesia dalam Kerja sama Selatan adalah negara-negara yang terkait dengan integritas wilayah NKRI dan stabilitas kawasan. Salah satu isu yang terkait dengan hal tersebut adalah isu Gerakan Papua Merdeka. Isu ini menjadi salah satu alasan Indonesia memprioritaskan Timor Leste dan negara-negara di kawasan Asia Pasifik sebagai negara tetangga Indonesia di bagian timur dalam Kerja sama Selatan-selatan. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dukungan dan

kepercayaan serta meredam isu yang mengancam integritas NKRI tersebut.<sup>18</sup>

## 3. Perlindungan WNI

Selain perbatasan dan integritas nasional, keamanan warga negara Indonesia di luar negeripun menjadi kepentingan selanjutnya atas kebijakan Indonesia dalam menentukan sebuah kebijakan luar negeri. Dan dalam Kerja sama selatan-selatan perlindungan WNI merupakan salah satu kepentingan yang dapat dicapai dalam memberikan dan melaksanakan program Kerja sama Selatan-selatan.

Mengingat Timor Leste merupakan negara yang dulu dipenuhi konflik saudara, Indonesia menandatangani perlindungan WNI di Timor Leste melalui perwakilan kedutaan Indonesia di Dili. Kerja sama selatan-selatan yang diarahkan ke workshop, seminar merupakan pilihan Kerja sama yang dapat dilakukan untuk kepentingan ini.<sup>19</sup>

## Kesimpulan

Kerja sama selatan-selatan merupakan Kerja sama antar negara berkembang yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan negara-negara berkembang. Kerja sama ini dimulai dengan konsep kerja sama ekonomi dan kerja sama teknis yang mulai berkembang dalam bentuk pertukaran pengetahuan, peningkatan sumber daya manusia, dan teknologi. Kesenjangan negara berkembang dan negara maju merupakan salah satu alasan lahirnya kerja sama ini.

Kepentingan nasional merupakan faktor utama Indonesia dalam pengambilan kebijakan kerja sama selatan-selatan. Salah satu kepentingan

---

<sup>17</sup> Indonesia dan Timor Leste Sepakati penyelesaian sengketa perbatasan darat. Juli 2019. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/22/19233951/indonesia-dan-timor-leste-sepakati-penyelesaian-sengketa-perbatasan-darat>

---

<sup>18</sup> Op Cit, . Reorientasi Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular bagi Kepentingan Nasional

<sup>19</sup> Op cit. Reorientasi Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular bagi Kepentingan Nasional

Indonesia adalah Kerja sama selatan-selatan membawa citra negara dalam forum internasional yang menjadi wadah bagi Indonesia untuk memperluas pengaruh dalam kawasan negara-negara selatan. Kepentingan-kepentingan ini dikelompokkan dalam kepentingan politik, kepentingan ekonomi dan kepentingan pertahanan dan kemanan.

Memperbaiki citra Indonesia juga termasuk salah satu kepentingan yang ditonjolkan Indonesia dalam kerja sama ini khususnya terhadap negara Timor Leste. Ikatan historis antara Indonesia-Timor Leste yang tidak biasa menjadi salah satu alasan Indonesia memprioritaskan Timor Leste dalam Kerja sama selatan-selatan. Kerja sama ini menunjukkan bentuk kepedulian Indonesia terhadap negara yang telah melepaskan diri dari Indonesia.

Indonesia memperhatikan bahwa Timor Leste merupakan negara konsumen tertinggi produk ekspor Indonesia sehingga Indonesia dapat dengan mudah memasuki pasar Timor Leste melalui Kerja sama ini. Mempertahankan konsumen bagi produk-produk dan komoditi ekspor Indonesia menjadi salah satu kepentingan dalam bidang ekonomi yang dijalankan Indonesia dalam kerja sama ini.

Selain itu, mempertahankan integritas negara merupakan salah satu alasan krusial Indonesia dalam memberikan Kerja sama selatan-selatan di Timor Leste. Sebagai negara terdekat di bagian timur Indonesia. Hal-hal lain seperti perlindungan WNI yang tinggal di Timor Leste ataupun di perbatasan Indonesia-Timor Leste merupakan prioritas penting Indonesia lainnya yang dijadikan kepentingan Indonesia dalam pertahanan dan kemanan negara dan warganegara.

Kepentingan dan peluang Indonesia dalam kerja sama selatan-selatan merupakan salah satu faktor dalam pengambilan kebijakan kerja sama selatan-selatan. Tujuan yang dicapai dalam Kerja sama selatan-selatan merupakan bentuk keoptimisan dan interdependensi negara-negara berkembang dengan solidaritas dan prinsip mutualisme yang dibangun dalam Kerja sama selatan-selatan.

Pentingnya Kerja sama selatan-selatan bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia dapat dijadikan dorongan bagi negara-negara berkembang lainnya untuk berperan aktif dalam Kerja sama pembangunan ini. Prospek Kerja sama selatan-selatan merupakan bentuk investasi Indonesia dalam meningkatkan hubungan baik dengan negara-negara yang memiliki kekuatan setara dengan Indonesia, sehingga mewujudkan politik "*million friends, zero enemy*" dan mewujudkan kekuatan bagi negara-negara selatan dalam pertumbuhan global. Indonesia sendiri telah menunjukkan kualitas dan kuantitas program Kerja sama Selatan-selatan Indonesia dan dampaknya terhadap negara-negara yang menerima Kerja sama ini. Selain meningkatkan pembangunan di negara lain, Kerja sama ini terus meningkatkan pengalaman, pengetahuan dan pembangunan di Indonesia.

### Daftar Pustaka

Adam Noor, Boeikie, Alasan Indonesia Terpilih Menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB Periode 2019-2020. Jurusan Hubungan Internasional, UIN SYARIF HIDAYATULLAH, Jakarta. 2019.

BPPK Kemlu RI. 2015. *Reorientasi Kerja sama Selatan Selatan*

- dan *Triangular bagi Kepentingan Nasional*, Kajian Mandiri.
- Bulbul Abdurachman & Bagus Mi'raz Prakoso, 2017. Peran Indoensia dalam Kerja sama Selatan-selatan dan Triangular, *Jurnal Transborders: Vol.1 No.1*.
- CEACoS FISIP UI, 2010, Studi Arah Kebijakan Indonesia dalam Kerja sama Selatan-Selatan Laporan Akhir dan Policy Paper, Universitas Indonesia, Jakarta. Diakses pada Oktober 2019.
- Donald E. Nuechterlein, 1976. National Interests and Foreign Policy: A conceptual framework for Analysis and decision making. *British Journal of International Studies* Vol. 2, No. 3
- DSF Indonesia. *Rencana pengelolaan batas wilayah negara Kawasan perbatasan 2011-2014*, diakses dari [www.dsfindonesia.org](http://www.dsfindonesia.org) (diakses pada 24 November 2020)
- Kemlu.go.id, *KBRI Dili, Profil negara Timor Leste*. Diakses dari [https://kemlu.go.id/dili/id/pages/profil\\_negara\\_timor-leste\\_/1748/etc-menu](https://kemlu.go.id/dili/id/pages/profil_negara_timor-leste_/1748/etc-menu) (diakses pada 22 Oktober 2020)
- Kokange, J. O., 2014, *The Evolution of South-South Cooperation: A Personal Reflection*, Global Policy Essay, July.
- Laporan Tahunan Kerja sama Selatan - Selatan dan Triangular Tahun 2016.
- Level. John P. 1970. *Foreign Policy in Perspective: Strategy, Adaptation, Decision Making*. New York.
- Nadjundan, S. 1986. "From North-South to South-South". *Economic and Political Weekly*, Vol. 21, No. 38/39. Diakses pada 24 Oktober 2020
- Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Indoensia Tahun 2015-2020
- Suyanto, Bagong dan Satinah, 2006. *Metode Penelitian Sosial sebagai Alternatif Pendekatan*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Timor Leste ajak Indonesia penuhi kuota ekspor. Diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/1061256/timor-leste-ajak-indonesia-kerja-sama-penuhi-kuota-ekspor> (diakses pada 22 November 2020)